JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi
E-ISSN: 2686-5238
P-ISSN: 2686-4916
https://dinastirev.org/JEMSI dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jemsi.v7i2
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 30 Oktober 2025 | **Revised:** 10 November 2025 | **Accepted:** 22 November 2025

Evaluasi Aplikasi Gajiweb Kementerian Keuangan dengan Menggunakan Metode *System Usability Scale* (SUS)

Renny Sukmono[1], Dwi Ari Wibawa[2], Muchamad Amrullah[3], Gustian Sani Gautama[4]
[1]Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Indonesia, renny@pknstan.ac.id
[2]Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Bogor, Indonesia, dwi.ariwibawa@kemenkeu.go.id
[3]Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Bogor, Indonesia, mas.amrullah@gmail.com
[3]Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Jakarta, Indonesia, gustian.sani@kemenkeu.go.id

Corresponding Author: renny@pknstan.ac.id[1]

Abstract: *This study was conducted to determine the level of usability of the Ministry of Finance's Gajiweb Application using the System Usability Scale (SUS) Method. The novelty of this study lies in the object of the study, namely the Ministry of Finance's Gajiweb Application, whose usability level has not been measured so far. An evaluation of this application was previously conducted by the Directorate General of Treasury using the Delone and Mc.Lean Success Method. This study uses a qualitative approach, with data obtained from a survey of end users of the Ministry of Finance's Gajiweb Application. The analysis technique used is the SUS Method to calculate the level of usability of the Ministry of Finance's Gajiweb Application. The results of the study indicate that the level of usability of the Ministry of Finance's Gajiweb Application is 68.9, meaning that this application is starting to be accepted by its users, but still requires a number of developments to improve performance, including the addition of features frequently needed by employees, the provision of technical instructions for use that are always updated according to the developments carried out and these instructions are displayed on the website.*

Keywords: *Information Systems, SUS, Gajiweb*

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kebergunaan Aplikasi Gajiweb Kementerian Keuangan dengan menggunakan Metode System Usability Scale (SUS). Kebaruan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu Aplikasi Gajiweb Kementerian Keuangan selama ini belum dilakukan pengukuran tingkat kebergunaannya. Evaluasi terhadap aplikasi ini pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan menggunakan Metode Kesuksesan Delone dan Mc.Lean. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data yang diperoleh dari survei kepada end user Aplikasi Gajiweb Kementerian Keuangan. Teknik analisis yang digunakan adalah Metode SUS untuk menghitung tingkat kebergunaan Aplikasi Gajiweb Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat usability Aplikasi Gajiweb Kementerian Keuangan adalah sebesar 68,9, artinya aplikasi ini mulai diterima oleh penggunanya, namun masih memerlukan sejumlah pengembangan untuk meningkatkan kinerja antara lain penambahan fitur yang sering dibutuhkan pegawai,

adanya petunjuk teknis penggunaan yang selalu *update* sesuai dengan pengembangan yang dilakukan dan petunjuk ini ditampilkan pada *website*.

Kata Kunci: Sistem Informasi, SUS, Gajiweb

PENDAHULUAN

Saat ini, TIK menjadi salah satu alat strategis untuk meningkatkan daya saing institusi pemerintah. Kementerian/lembaga pemerintah juga berlomba untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dengan melakukan pengembangan terhadap TIK dalam menjalankan proses bisnisnya. Pelayanan kepada publik tidak terlepas dari perkembangan Bidang TIK ini. (Firmansyah et al., 2025) Begitu juga Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan), TIK merupakan pendukung bisnis (*business enabler*) dan penopang (*backbone*) transformasi digital Ditjen Perbendaharaan. Transformasi digital Ditjen Perbendaharaan diperlukan untuk mewujudkan salah satu kinerja utama strategis Ditjen Perbendaharaan yaitu pengelolaan kas yang modern, *prudent* dan inovatif serta mendukung perubahan ke era digital di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka mewujudkan *digital government*.

Transformasi digital pada Ditjen Perbendaharaan merupakan langkah strategis yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Pengawasan yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan memperkecil risiko terjadinya penyelewengan. (Arniya et al., 2025) Salah satu langkah dan inisiatif yang dilakukan Ditjen Perbendaharaan dalam transformasi digital adalah pengembangan sistem informasi keuangan. Peran signifikan sistem informasi yaitu menyediakan dukungan dalam pengambilan keputusan manajemen yang efektif berdasarkan data dan informasi (Nawawi & Fazri, 2022). Pengembangan sistem informasi keuangan ini diperlukan untuk membangun atau meningkatkan sistem informasi keuangan yang terintegrasi untuk mendukung pengelolaan keuangan yang efektif. Sistem informasi dikatakan baik jika bisa menciptakan keharmonisan langkah antar instansi untuk pencapaian tujuan. (Anggraini & Medan, 2019) Pengembangan sistem ini diharapkan mampu mengelola data secara efisien, memfasilitasi pelaporan secara *real time* dan memberikan aksesbilitas yang mudah bagi para pemangku kepentingan. Namun, integrasi sistem informasi ini juga memiliki kelemahan yaitu jika terdapat salah satu kesalahan akan mempengaruhi proses bisnis instansi lainnya. (AlMuhayfith & Shaiti, 2020)

Berdasarkan PMK 133 tahun 2022, beberapa hal penting yang harus diperhatikan untuk mendukung transformasi digital yaitu proses bisnis Kementerian Keuangan, strategi dan investasi TIK, serta manajemen resiko dan pengukuran kinerja TIK (Kementerian Keuangan RI, 2022). Pengukuran kinerja TIK ditujukan untuk mengukur manfaat tata kelola TIK dalam mencapai visi dan misi Kementerian Keuangan. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat kontribusi TIK bagi organisasi, perspektif pengguna dan penyempurnaan operasional.

Pengukuran kinerja TIK sangat penting dilakukan karena investasi TIK melibatkan biaya yang sangat besar. *Enterprise resource planning* (ERP) merupakan suatu model sistem informasi yang memberikan kemungkinan suatu organisasi untuk melakukan otomasi dan mengintegrasikan proses bisnis utamanya. Integrasi ini memungkinkan adanya standarisasi proses bisnis dan penyimpanan data yang dilakukan secara terpusat sehingga pengambil keputusan organisasi mendapatkan data yang aktual (Pervan & Dropulić, 2020). Sejumlah penelitian menyatakan perlu adanya kehati-hatian dalam penerapan ERP ini. Investasi dalam jumlah besar untuk pembangunan suatu sistem, tetapi banyak dijumpai kegagalan dalam implementasi sistem tersebut dan juga peningkatan produktivitas organisasi tidak terlalu signifikan (Davenport, 1998). Implementasi ERP adalah kegiatan yang sangat rumit karena terjadi perubahan dalam internal organisasi dan melibatkan biaya yang sangat tinggi, sehingga

implementasi ERP membutuhkan pengorbanan waktu dan biaya (Shanks & Seddon, 2000). Pada kenyataannya 90% implementasi ERP melebihi batas waktu yang ditetapkan dan biaya awal yang direncanakan. Selain itu, Implementasi ERP tidak memberikan hasil yang diharapkan.

Salah satu pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan adalah Gajiweb Kementerian Keuangan. Gajiweb Kementerian Keuangan merujuk pada aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk mengelola proses penggajian pegawai secara elektronik. Ini adalah sebuah sistem yang memungkinkan Kementerian Keuangan untuk menghitung, memproses, dan mengelola gaji pegawai secara efisien dan transparan menggunakan *platform* berbasis web. Aplikasi ini memungkinkan data gaji pegawai diakses dan dikelola secara elektronik, yang memudahkan pengelolaan dan mengurangi potensi kesalahan. Selain itu, aplikasi ini juga memudahkan pegawai untuk mengakses informasi gaji mereka dan memastikan bahwa proses pemberian gaji pegawai berjalan semestinya dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2023 Ditjen Perbendaharaan bekerjasama dengan Universitas Indonesia melakukan pengukuran kepuasan pengguna terhadap sistem informasi di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Salah satu sistem informasi yang menjadi sampel adalah Gajiweb. Sebanyak 42% dari total responden berasal dari Pulau Jawa. Pada survei ini, Gajiweb mendapatkan skor 4,56 dari skala 5. Variabel yang digunakan pada survei ini yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, sosialisasi dan pelatihan, keuntungan bersih dan kepuasan pengguna. variabel ini merupakan pengembangan dari metode Kesuksesan sistem informasi bergantung pada kualitas sistem, kualitas layanan dan kualitas informasi (Marselina et al., 2022). Capaian skor pada tiap-tiap variabel yang didapatkan oleh Aplikasi Gajiweb adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Survei Kepuasan Aplikasi Gajiweb

Variabel	Skor
Kualitas Sistem	4,51
Kualitas Informasi	4,61
Service Quality	4,51
Organizational Support	4,53
Net Benefit	4,64
User Satisfaction	4,54

Sumber: data penelitian

Capaian nilai kepuasan 4,56 secara keseluruhan sebenarnya merupakan capaian yang sudah memuaskan, tetapi belum mencapai target yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk kualitas aplikasi pada tahun 2023 yaitu sebesar 4,61. Kualitas sistem dan kualitas informasi mendapatkan nilai evaluasi terendah. Salah satu penelitian yang menggunakan objek yaitu aplikasi Gajiweb menyatakan bahwa jika terjadi gangguan pada aplikasi Gajiweb maka akan menurunkan aspek reliabilitas yaitu tidak terpenuhinya janji layanan instansi. (Priyanto & Rahman, 2025) Penelitian hanya meneliti secara mendalam salah satu output Aplikasi Gajiweb yaitu penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP). Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat kebermanfaatan (*usability*) aplikasi Gajiweb Kementerian Keuangan dengan menggunakan Metode *System Usability Scale* (SUS). *Score* SUS yang didapatkan akan menunjukkan seberapa diterima aplikasi ini oleh penggunanya.

Sistem informasi hadir sebagai suatu nilai positif pada era perkembangan teknologi yang semakin pesat. (Saputra et al., 2024) Sistem informasi merupakan serangkaian perangkat keras, perangkat jaringan, perangkat lunak, sumber daya manusia, serta prosedur dan/atau aturan yang dikelola secara terpadu untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna untuk mencapai suatu tujuan. (Keuangan, 2022) Komponen sistem informasi terdiri dari perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), telekomunikasi, database, dan data *warehouses*, serta mencakup sumber daya manusia (SDM) dan prosedur. (De Fretes et al., 2023) Sumber daya

manusia adalah komponen penting dalam sistem pengolah informasi. Tingkat pemahaman manusia sebagai pengolah informasi menjadi penting dalam perancangan sistem informasi.

Pengukuran kinerja menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kemajuan suatu organisasi dan termasuk di dalamnya adalah seluruh karyawannya untuk menghasilkan capaian yang lebih baik. Sistem informasi yang efektif akan meningkatkan kepuasan pengguna sehingga akan menciptakan loyalitas pengguna yang akan mendorong pengguna untuk terus menggunakan sistem informasi tersebut. (Murnita et al., 2016) Pengukuran terhadap peforma sistem informasi akan menghasilkan data-data. Apabila data dianalisis secara tepat akan memberikan informasi yang akurat. Keakuratan informasi ini akan berguna bagi peningkatan pengetahuan para manajer dalam pengambilan keputusan atau tindakan manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja pegawai berkaitan erat dengan penyelesaian tugas tertentu, apakah berhasil atau gagal.(Satria & Dewi, 2019) Pengukuran kinerja dikelompokkan menjadi dua yaitu tradisional dan kontemporer. Pengukuran kinerja tradisional dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan ataupun dengan biaya standar sesuai dengan karakteristik pertanggungjawabannya. Sementara itu, pengukuran kinerja kontemporer adalah pengukuran yang menggunakan aktivitas sebagai pondasinya.

Penggajian pegawai memiliki keunikan masing-masing di setiap instansi. Tiap-tiap pegawai memiliki karakteristik gaji yang berbeda-beda pula. Hal ini menjadi kesulitan tersendiri bagi instansi yang memiliki jumlah pegawai yang besar dan harus melakukan kalkulasi secara cepat dan tepat dalam proses penggajian. (Rahanra, 2017) Untuk itu, pada setiap instansi perlu disusun sebuah desain sistem penggajian. Desain sistem penggajian ini harus mampu memastikan validitas, wewenang, integritas, klasifikasi penilaian, ketepatan waktu dan keakuratan *posting*. (Munasti & Hasibuan, 2022)

Gaji web Kementerian Keuangan merujuk pada sistem atau aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Kementerian Keuangan Indonesia untuk mengelola proses penggajian pegawai secara elektronik. Ini adalah sebuah sistem yang memungkinkan Kementerian Keuangan untuk menghitung, memproses, dan mengelola gaji pegawai secara efektif, efisien dan transparan menggunakan *platform* berbasis web.

Beberapa fitur yang dimiliki oleh Aplikasi Gaji Web Kementerian Keuangan antara lain:

1. Pengelolaan data pegawai;
2. Perhitungan gaji otomatis;
3. Pengelolaan pajak dan potongan;
4. Histori gaji;
5. Pelaporan dan analisis;

Penggunaan Aplikasi Gaji Web Kementerian Keuangan membawa berbagai manfaat, termasuk peningkatan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan gaji pegawai. Ini juga memudahkan pegawai untuk mengakses informasi gaji mereka.

Metode SUS dilakukan dengan menggunakan kueioner untuk mengetahui persepsi pengguna terkait pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan sistem informasi. Salah satu keuntungan metode ini adalah sampel yang dibutuhkan tidak besar karena konsistensi dan validitas yang telah terbukti pada sampel kecil. (Tsani, 2024) Fokus dari *usability* adalah kemampuan pengguna dalam menggunakan produk untuk mencapai tujuan yang diharapkan. (Rachmawati & Setyadi, 2023) Reaksi pengguna teknologi informasi akan mempengaruhi sikap pengguna dalam penerimaan penggunaan teknologi informasi. (Pratiwi et al., 2021) Metode SUS ini memiliki tiga karakteristik, yaitu:

a. kuesioner hanya terdiri dari 10 pertanyaan yang mudah dipahami dan dapat dikerjakan secara cepat oleh responden
b. metode ini bisa digunakan secara luas untuk mengevaluasi berbagai jenis interface, baik website, smartphone, dan lainnya;

c. *score* SUS dinyatakan dalam range 0 sampai dengan 100, rentang nilai ini lebih mudah dipahami oleh responde. (Rachmawati & Setyadi, 2023)

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk melakukan eksplorasi makna subjektif perilaku, nilai dan pengalaman baik kelompok maupun individu pada konteks sosial tertentu. (Sari et al., 2002) Data akan dianalisis dengan menggunakan statistika deskriptif yaitu rata-rata. Untuk menangkap informasi lebih detail, pada kuesioner penelitian ini disediakan ruang untuk pertanyaan terbuka sehingga responden dapat menyatakan persepsinya terhadap aplikasi Gajiweb Kementerian Keuangan. Selain itu, peneliti juga menggunakan wawancara kepada pengembang aplikasi untuk mendapat gambaran terkait pengembangan aplikasi ini. Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur memberikan kesempatan pewawancara untuk menggali lebih dalam sehingga mendapatkan hasil yang lebih bermakna. (Fadhallah, 2020)

Kuesioner *system usability scale* (SUS) disebarkan kepada pengguna aplikasi Gajiweb Kementerian Keuangan di seluruh satuan kerja di Pulau Jawa. Berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi Gajiweb, diketahui bahwa jumlah satuan kerja terbanyak terdapat di pulau Jawa. Penyebaran dilakukan melalui *gform* yang disampaikan melalui kantor pelayanan perbendaharaan (KPPN) di seluruh pulau Jawa.

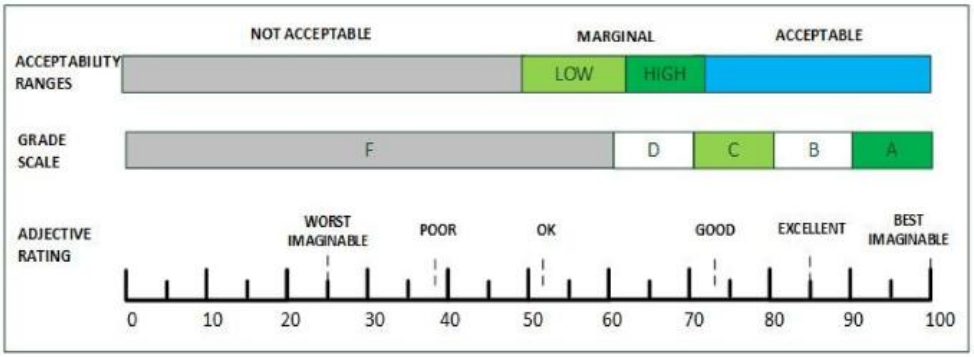
Instrumen yang digunakan untuk melakukan analisis aspek *usability* menggunakan kuesioner *system usability scale* (SUS) yang dikemukakan oleh John Brooke (1996). Skala penilaian yang digunakan pada kuesioner SUS adalah skala likert 1 s.d 5 (sangat tidak puas sampai dengan sangat puas). Langkah-langkah dalam mendapatkan nilai skala SUS adalah sebagai berikut:

a. Untuk setiap pertanyaan dengan nomor ganjil, hasil skor dikurangi 1 dan untuk pertanyaan dengan nomor genap adalah mengurangi angka 5 dengan hasil skornya.
b. Jumlahkan semua hasil skor dari setiap responden dan hasil penjumlahan yang didapatkan, dikalikan 2,5;
c. Menghitung rata-rata hasil skor dari semua responden. Hasil inilah yang disebut Hasil Skor SUS yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat usability aplikasi.

Daftar pertanyaan pada SUS merupakan pertanyaan positif dan negatif. Cara perhitungan indeks SUS mempunyai formula perhitungan tersebut. Skema penghitungan SUS telah mengadopsi pertanyaan positif dan negatif sehingga dalam melakukan input data, peneliti ti dak melakukan pembalikan skala.

Tingkat *usability* aplikasi dapat dihitung dengan cara menghitung *SUS score percentile rank*, dengan percentile rank yang digunakan adalah kategori *Not Acceptable* jika nilai SUS kurang dari 50, kategori marginal jika nilai SUS antara 50 sampai dengan 70 dan kategori *Acceptable* jika nilai SUS yang didapatkan adalah lebih dari 70. Penilaian berdasarkan score SUS dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Penilaian metode SUS memiliki tiga aspek penting yaitu *acceptability, grade scale,* dan *adjective rating*. *Acceptability* adalah aspek penentu tingkat penerimaan aplikasi. Level penerimaan ini ada tiga level yaitu *not acceptable*, *marginal (low and high), acceptable. Grade scale* menunjukkan aspek tingkat kualitas aplikasi yang terdiri atas *grade scale* A, B, C, D, dan F. *Adjective rating* merupakan aspek yang menentukan rating kebergunaan aplikasi. *Adjective rating* terdiri atas beberapa tingkat, yaitu *worst imaginable, poor, ok, good, excellent,* dan *best imaginable*.



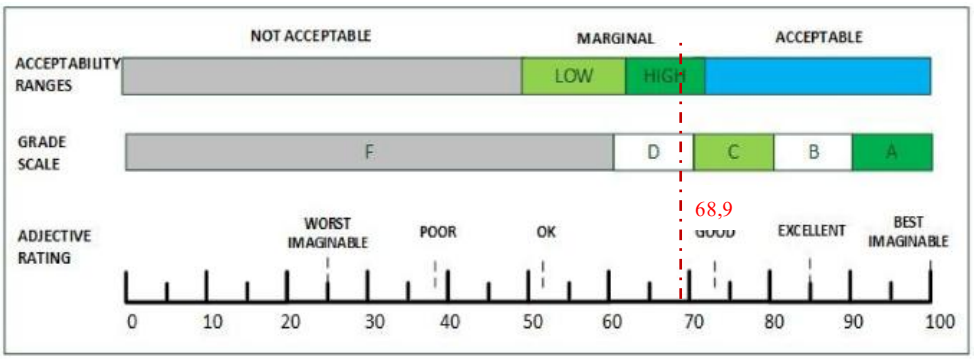
Gambar 1. Skor SUS (Bangor et al., 2009)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2020 akhir, aplikasi Gajiweb digunakan untuk pembayaran aparatur sipil negara (ASN) pusat, prajurit TNI dan ASN Kementerian Pertahanan; dan anggota POLRI dan ASN POLRI. Aplikasi Gaji Berbasis Web ini merupakan program aplikasi komputer berbasis web yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan digunakan untuk melakukan pengelolaan administrasi Belanja Pegawai. (Kementerian Keuangan, 2020) Aplikasi ini menjadi salah satu objek evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Namun, penelitian yang menggunakan objek aplikasi Gajiweb masih jarang. Penelitian dengan objek aplikasi Gajiweb dilakukan di KPPN Palangkaraya dengan mengambil salah satu fitur yaitu penerbitan SKPP. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa layanan digital SKPP Elektronik di KPPN Palangkaraya, sebagian telah memenuhi kritieria indikator kualitas layanan model Servqual dan pada sebagian lainnya masih memerlukan adanya optimalisasi agar kualitas layanan dapat meningkat. (Priyanto & Rahman, 2025) Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini melihat gambaran umum bagaimanakah tingkat penerimaan aplikasi ini berdasarkan persepsi pengguna.

Responden pada pengujian ini adalah pengguna aplikasi (*end user*) yaitu operator gaji satker pada kelima sampel yaitu satker-satker yang berada pada lingkup kerja KPPN Jakarta III, KPPN Bandung I, KPPN Semarang II, KPPN Yogyakarta dan KPPN Surabaya II. Responden yang menyampaikan jawaban sampai dengan 31 Juli 2024 sebanyak 93 responden.

Skore SUS dihitung berdasarkan tahapan yang dijelaskan pada bagian metode penelitian. Berdasarkan hasil olah data didapatkan score SUS sebesar 68,9.



Gambar 2. Hasil Score SUS

Penilaian metode SUS memiliki tiga aspek penting yaitu *acceptability*, *grade scale*, dan *adjective rating*. *Acceptability* adalah aspek penentu tingkat penerimaan aplikasi dengan level penerimaan yaitu *not acceptable*, marginal (*low and high*), *acceptable*. Pada pengujian terhadap *acceptability* aplikasi Gajiweb Kementerian Keuangan berada pada level ***marginal high***, artinya aplikasi ini sudah mulai diterima oleh penggunanya. *Grade scale* menunjukkan aspek tingkat kualitas aplikasi yang terdiri atas grade scale A, B, C, D, dan F. Untuk komponen *grade*

scale, aplikasi ini memiliki grade D. Sementara itu, *adjective rating* untuk aplikasi ini adalah berada pada level **OK**. *Adjective rating* merupakan aspek yang menentukan rating kebergunaan aplikasi. *Adjective rating* disimpulkan bahwa aplikasi Gajiweb Kementerian Keuangan ini sudah bisa dikatakan mulai dirasakan manfaatnya oleh pengguna, namun masih membutuhkan pengembangan di beberapa aspek.

Aspek-aspek apa saja yang sudah memuaskan pengguna dan aspek mana yang harus dikembangkan oleh pengelola aplikasi dapat dilihat pada hasil evaluasi tiap-tiap indikator.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Aspek Berdasarkan Kuesioner SUS

Pertanyaan SUS	Skor	Keterangan
Saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi	4,44	Setuju
Saya merasa aplikasi Gajiweb rumit untuk digunakan	2,04	Tidak Setuju
Saya merasa aplikasi Gajiweb mudah digunakan	4,17	Setuju
Saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan aplikasi Gajiweb	2,82	Tidak Setuju / Ragu-Ragu
Saya merasa fitur-fitur aplikasi Gajiweb berjalan dengan semestinya	4,18	Setuju
Saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten (tidak serasi pada aplikasi Gajiweb)	2,28	Tidak Setuju
Saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan aplikasi Gajiweb dengan cepat	3,86	Setuju / Ragu-Ragu
Saya merasa aplikasi Gajiweb membingungkan	1,96	Tidak Setuju
Saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan aplikasi Gajiweb	3,75	Setuju / Ragu-Ragu
Saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi Gajiweb	3,73	Setuju / Ragu-Ragu

Sumber: data penelitian

Dari sepuluh pertanyaan pada kusioner SUS, responden menyepakati jika aplikasi Gajiweb Kementerian Keuangan mudah digunakan, fitur-fiturnya berjalan dengan semestinya, dan akan menggunakan aplikasi ini kembali. Pengguna akan menggunakan aplikasi ini kembali menunjukkan bahwa pengguna tersebut telah merasakan manfaat dari aplikasi tersebut sehingga akan menggunakan kembali aplikasi ini. Hal ini sesuai dengan hasil pertanyaan terbuka bahwa pengguna merasakan sejumlah keuntungan setelah menggunakan aplikasi ini, antara lain:

1. Pekerjaan menjadi lebih cepat, akurat dan lebih efisien. Aplikasi Gajiweb Kemeneku mempermudah pekerjaan pembuat daftar gaji sehingga bisa bekerja lebih cepat dan mengurangi kekhawatiran salah perhitungan dan hilangnya *database*. Aplikasi ini mampu meminimalisir kesalahan yaitu misalnya terjadi dobel bayar. Koneksi langsung antara aplikasi Gajiweb Kementerian Keuangan dengan SAKTI sangat membantu pengguna sehingga tidak memerlukan input yang berulang untuk hal yang sama
2. Aplikasi Gajiweb Kementerian Keuangan sangat praktis bisa digunakan dimana saja dan kapan saja;
3. Pengguna lebih mudah memantau status pekerjaan yang sudah dikerjakan, apakah ditolak atau selesai. Hal ini sangat membantu dalam melakukan revisi jika terdapat kesalahan;
4. Semua *database* tersimpan secara digital sehingga mempermudah pengguna pada saat terdapat pegawai yang mutasi.

Terdapat beberapa pertanyaan yang direspon cenderung ragu-ragu oleh pengguna, antara lain pengguna masih memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan aplikasi ini sehingga sangat wajar jika pengguna mengalami hambatan dalam penggunaannya. Pengguna juga merasa masih membutuhkan pendampingan atau asistensi dari pihak lain yang lebih memahami penggunaan aplikasi ini khususnya pada tahap awal menggunakan aplikasi ini. Sebagian besar responden berpendapat bahwa pengguna akan membutuhkan waktu untuk mempelajari dan memahami

cara penggunaan aplikasi ini karena pengalaman sejumlah pengguna menunjukkan bahwa proses pemahaman terhadap penggunaan aplikasi ini tidaklah singkat. Hal ini sejalan dengan sejumlah keluhan yang disampaikan oleh responden terhadap aplikasi ini yang disampaikan melalui pertanyaan terbuka. Keluhan-keluhan yang dirasakan antara lain:

1. Pengguna harus menguasai setiap tahapan untuk melanjutkan ke proses berikutnya;
2. Pengguna merasa lebih rumit khususnya pada saat membuat kekurangan gaji dan kekurangan tunjangan kinerja;
3. Terdapat kendala teknis yang seharusnya bisa diterima menjadi kendala karena ditolak oleh Aplikasi Gajiweb Kementerian Keuangan;
4. Ketika melakukan kesalahan entri susah sekali untuk menghapus dan jika sudah terhapus jejak kesalahan masih ada sehingga menyebabkan entri data salah menumpuk;
5. Pada aplikasi belum ada menu untuk cetak slip terkait belanja gaji, kekurangan gaji, tunjangan kinerja dan lembur (kecuali uang makan);
6. Menu untuk gaji dan uang makan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja (PPPK) belum masuk ke Aplikasi Gajiweb Kementerian Keuangan;
7. Monitoring pegawai pensiun dan berkala tidak berurutan setiap bulan;
8. Jika terdapat penolakan, pengguna kurang memahami keterangan pada kolom uraian sehingga pengguna tidak memahami dimana letak kesalahan;
9. Daftar dan rekap yang di-*download* terbatas, misalnya pada perhitungan tunjangan kinerja hanya bisa hasil rekap terakhir;
10. Belum ada panduan teknis yang disediakan pada aplikasi;
11. Jika terjadi kesalahan dalam penginputan maka harus menghapus dan mengulang kembali dari awal;
12. Penguna masih mengalami masalah waktu pengusulan kekurangan gaji kolektif;
13. Belum terdapat menu gaji untuk pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN);
14. Belum terdapat fitur bukti potong pajak baik untuk pegawai PNS maupun non-PNS;
15. Belum terdapat fitur *download* bukti potong pajak untuk pegawai, sehingga bendahara masih harus menyediakan bukti potong secara manual.

Keluhan pengguna yang disampaikan pada pertanyaan terbuka ini menjadi bahan diskusi pada saat melakukan wawancara dengan pengembang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sejumlah keluhan memang sudah menjadi rencana perbaikan oleh pengembang misalnya penambahan menu cetak slip gaji. Terdapat banyak pegawai yang membutuhkan slip gaji sehingga jika kebutuhan ini bisa disediakan oleh aplikasi Gajiweb Kementerian Keuangan akan sangat membantu bendahara. Selain itu, fitur untuk *download* bukti potong pajak juga bisa diakomodasi karena hampir setiap pegawai membutuhkannya. Permintaan penambahan menu gaji dan uang makan untuk PPNPN tidak diakomodir karena telah disediakan aplikasi yang berbeda. Terkait keluhan input gaji harus dilakukan pengulangan apabila salah input tetap harus dilakukan karena terkait validasi aplikasi untuk keamanan data. Selain masukan terhadap aplikasi, responden juga menyarankan adanya sosialisasi berkala dari pengembang jika terdapat pembaruan fitur pada aplikasi. Sosialisasi akan lebih efektif lagi, jika semua petunjuk penggunaan aplikasi disajikan dalam aplikasi.

KESIMPULAN

Tingkat *usability* aplikasi Gajiweb Kementerian Keuangan berdasarkan metode SUS mendapatkan skor 68,9 artinya aplikasi ini sudah mulai diterima oleh pengguna karena pengguna telah merasakan manfaat yang besar dari aplikasi ini. Namun, masih terdapat sejumlah perbaikan yang harus dilakukan pengembang untuk lebih meningkatkan peforma pada aspek ini. Aspek sumber daya manusia diperlukan *upgrading* kompetensi pengguna aplikasi pada tingkat satuan kerja seiring dengan pengembangan aplikasi atau pengembang dapat menyediakan petunjuk teknis yang selalu *update* dan ditampilkan pada aplikasi. Sementara perbaikan pada aplikasi antara lain penambahan fitur pada aplikasi antara lain penambahan fitur

cetak slip gaji (bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pegawai apabila membutuhkan slip gaji), perbaikan pada *database* yaitu migrasi database gaji PNS pusat (GPP) ke aplikasi Gajiweb Kementerian Keuangan dengan tujuan untuk mengakomodasi *download* daftar dan rekapitulasi gaji secara lengkap. Perbaikan yang paling banyak disarankan oleh pengguna adalah jika terjadi kesalahan input, pengguna tidak harus mengulang dari awal atau bisa memanggil kembali data yang terdapat dalam *history*.

Penelitian ini baru melihat nilai tingkat *usability* aplikasi Gajiweb Kementerian Keuangan. Selain itu juga menjelaskan keunggulan dan kelemahan aplikasi, selain itu juga menjaring saran perbaikan dari pengguna aplikasi. Penelitian selanjutnya dapat meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *usability* aplikasi dari aspek pengguna, misalnya faktor jenis kelamin, usia, lama pengalaman dalam menggunakan aplikasi, frekuensi penggunaan dan lain-lain.

REFERENSI

AlMuhayfith, S., & Shaiti, H. (2020). The impact of enterprise resource planning on business performance: With the discussion on its relationship with open innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, *6*(3), 87. https://doi.org/10.3390/JOITMC6030087

Anggraini, P. N., & Medan, U. N. (2019). Journal Economy And Currency Study (JECS) Volume 1, Issue 2, Juli 2019 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Serdang Bedagai. *Journal Economy and Currency Study*, *1*(2), 16–26.

Arniya, Rifayani, Norpaizah, Ayu Astri Solissa, & Wahjoe Pangestoeti. (2025). Efektivitas Pengawasan APBN dalam Mencegah Penyimpangan Anggaran. *Jurnal Cakrawala Akademika*, *1*(5), 1619–1626. https://doi.org/10.70182/jca.v1i5.8

Bangor, A., Kortum, P., & Miller, J. (2009). Determining what individual SUS scores mean; adding an adjective rating. *Journal of Usability Studies*, *4*(3), 114–123.

Davenport, T. H. (1998). Putting the enterprise into the enterprise system. *Harvard Business Review*, *76*(4), 121–131.

De Fretes, S. N., Manuputty, G. S., Samalelaway, V., Rupilu, V., Tutuarima, A. J., Crissel, N. D. G., Lausepa, T., Syahailatua, M., & Solisa, H. K. (2023). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Sistem Penggajian Pada Sadajiva Café (Stephanie N. de Fretes Analisis Sistem Informasi Akuntansi Sistem Penggajian Pada Sadajiva Cafe. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, *1*(2), 511–524.

Fadhallah. (2020). *Wawancara*. Universitas Negeri Jakarta.

Firmansyah, V., Supriadi, F., & Junaedi, D. I. (2025). ANALISIS WEBSITE SITABAH MENGGUNAKAN METODE SYSTEM USABILITY. *Jurnal Informatika*, *August*.

Kementerian Keuangan, R. (2020). *PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMORPER- 24 /PB/2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI GAJI DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI GAJI MODUL SATKER BERBASIS WEB*.

Kementerian Keuangan RI. (2022). *KMK Nomor 269/KMK.01/2021 tentang Tata Kelola di Lingkungan Kementerian Keuangan*. 1–31.

Keuangan, K. (2022). *PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133/PMK.01/2022 TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN*.

Marselina, L., Kaniawulan, I., & Singasatia, H. D. (2022). Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu bank milik negara terbesar di Indonesia. *Jurnal Informatika Teknologi Dan Sains*, *4*(3), 193–198.

Munasti, C., & Hasibuan, N. F. A. (2022). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Karyawan Honorer Pada Sekretariat Dpr Kota Subulussalam. *Worksheet : Jurnal*

Akuntansi, *2*(1), 21–25. https://doi.org/10.46576/wjs.v2i1.2611

Murnita, R., Sediyono, E., Tri Purnami, C., Program Pascasarjana Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, M., Satya Wacana Salatiga, K., Kesehatan Masyarakat, F., & Diponegoro, U. (2016). *Evaluation of the Performance of Pharmacy Management Information System at Roemani Muhammadiyah Hospital with HOT-Fit Models*. *04*(01).

Nawawi, M., & Fazri, E. (2022). Integrasi Sistem ERP, Arus Informasi Dan Kualitas Informasi. *Jurnal Akademi Akuntansi*, *5*(1), 88–101. https://doi.org/10.22219/jaa.v5i1.18054

Pervan, I., & Dropulić, I. (2020). The influence of integrated information systems on firm financial performance. *Croatian Operational Research Review*, *11*(2), 301–309. https://doi.org/10.17535/CRORR.2020.0024

Pratiwi, N. P. P., Sunarwijaya, I. K., & Adiyandnya, M. S. P. (2021). Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. *Jurnal Kharisma*, *3*(1), 403–412.

Priyanto, A., & Rahman, A. (2025). Model Layanan Digital Penerbitan dan Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Elektronik pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangkaraya. *Journal of Multidisciplinary Reserach and Development*, *7*(4), 2826–2839.

Rachmawati, I., & Setyadi, R. (2023). Evaluasi Usability Pada Sistem Website Absensi Menggunakan Metode SUS. *Journal of Information System Research (JOSH)*, *4*(2), 551–561. https://doi.org/10.47065/josh.v4i2.2868

Rahanra, N. (2017). Sistem Informasi Penggajian Pada Pt. Sinar Indah Nabire Papua. *Jurnal FATEKSA: Jurnal Teknologi Dan Rekayasa*, *2*(1), 30–39.

Saputra, P. M., Suhartono, E., Durya, N. P. M. A., & TAH, N. (2024). Analisis Kinerja Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Moderasi Pendidikan Dan Pelatihan Pengguna. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, *16*(2), 78–94. https://doi.org/10.33747/stiesmg.v16i2.703

Sari, A. R., Husnawati, H. Al, Suryono, J., Marzuki, & Mulyapradana, A. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Yayasan Putra Adi Dharma.

Satria, P. A., & Dewi, P. P. (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI: STUDI KASUS PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KABUPATEN GIANYAR. Universitas Mahasaraswati Denpasar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, *4*(1), 81–95. http://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi

Shanks, G., & Seddon, P. (2000). Enterprise resource planning (ERP) systems. *Journal of Information Technology*, *15*, 243–244.

Tsani, A. Z. K. (2024). Evaluasi User Experience EduSmart Menggunakan System Usability Scale (SUS). *Repeater: Publikasi Teknik Informatika Dan Jaringan*, *2*(3), 91–101.